



Optimalisasi Mata Pelajaran Muatan Lokal pada Kurikulum Merdeka (Studi pada Mata Pelajaran Keminangkabauan, Sumatera Barat)

Rilci Kurnia Illahi[✉], Rahmi Yunita², Khadijah³, Andika Dirsa⁴, Ade Sri Wahyuni⁵

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia^{1,2,3,4,5}

e-mail : rilcikurnia@uinib.ac.id¹, rahmiyunita@uinib.ac.id², khadijahmpd@uinib.ac.id³,
andikadirsa@uinib.ac.id⁴, ade.sri@uinib.ac.id⁵

Abstrak

Budaya Alam Minangkabau (BAM) sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal diimplementasikan kembali pada Kurikulum Merdeka sebagai Mata Pelajaran Keminangkabauan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi tulisan dari Afrilya dkk., (2020) yang menyatakan faktor penyebab diberhentikannya BAM di Sumatera Barat, sehingga diperlukan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *Systematic Literature Review* (SLR). Sumber utama penelitian ini adalah sepuluh literatur yang diperoleh dari platform elektronik yang terindeks sinta, seperti Portal Garuda, Google Scholar, dan *Direct of Open Access Journals* (DOAJ) yang publish pada tahun 2019 sampai 2023. Hasil penelitian menyatakan bahwa Mata Pelajaran Keminangkabauan membutuhkan perhatian: 1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2) tim pengembangan kurikulum tingkat daerah 3) sekolah dan komite 4) Guru 5) Perguruan Tinggi Sumatera Barat 6) Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumatera Barat dan 7) tokoh masyarakat seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Penyediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan tindakan yang dapat dilakukan sekolah dan komite untuk berhasil mengimplementasikan mata pelajaran Keminangkabauan dalam kurikulum Merdeka. Guru Keminangkabauan yang berpartisipasi aktif dalam MGMP/KKG dapat memperluas pandangan dan pengetahuannya dalam berbagai hal. Selain itu, juga perlu bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, BBPMP dan LKAAM sebagai Lembaga yang memberikan sarana untuk melestarikan budaya dan Adat Minangkabau.

Kata Kunci: Muatan Lokal, Kurikulum Merdeka, Keminangkabauan.

Abstract

The Minangkabau Natural Culture (BAM) as a Local Load Lesson is reimplemented in the Merdeka Curriculum as the Lesson of Keminangkabauan. The purpose of this article is to supplement the research by Afrilya et al., (2020), which state the factors that caused the suspension of BAM in Western Sumatra, so a solution is needed to deal with it. This research uses a qualitative approach with the method of Systematic Literature Review (SLR). The main source of the research is ten pieces of literature obtained from Sinta indexed electronic platforms, such as Portal Garuda, Google Scholar, and Direct of Open Access Journals (DOAJ) which were published in 2019-2023. The results of the research indicate that the learning point of Keminangkabauan needs attention: (1) The Government of the Province of Western Sumatra; (2) The curriculum development team at the regional level; (3) Schools and committees; (4) Teachers; (5) The West Sumatra Colleges; (6) Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) of West Sumatra; and (7) Community figures such as the Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Providing support facilities is an action that schools and committees can take to implement voluntary education subjects in the Merdeka curriculum successfully. Teachers participating actively in MGMP/KKG can broaden their views and knowledge in various ways. In addition, it is also necessary to cooperate with the colleges, BBPMP, and LKAAM as an institution that provides means for preserving Minangkabau's culture and origins

Keywords: Local Content Subject, Merdeka Curriculum, Keminangkabauan.

Copyright (c) 2024 Rilci Kurnia Illahi, Rahmi Yunita, Khadijah, Andika Dirsa, Ade Sri Wahyuni

✉ Corresponding author :

Email : rilcikurnia@uinib.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7367>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Kemajuan globalisasi bagaikan dua mata pisau yang apabila digunakan dengan bijak maka akan menimbulkan kemudahan, sedangkan apabila tidak sikapi dengan hati-hati maka akan mempersulit diri. Gelombang arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat dewasa ini telah menyebabkan semakin meningkatnya kemerosotan moral yang dialami oleh generasi muda dan pelajar. Kemajuan globalisasi mengakibatkan tergerusnya budaya lokal, hilangnya rasa nasionalisme, kurangnya sikap kekeluargaan, serta gaya hidup remaja yang kebarat-baratan (Setyawati et al., 2021). Misalnya, munculnya fenomena Citayam Fashion Week sebagai ajang promosi kaum LGBT. Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa masyarakat perlu berhati-hati dengan digelarnya ajang ini karena bermunculan remaja laki-laki berpakaian seperti wanita (Kautsar, 2022). Selain itu, tawuran antar pelajar, bahaya seks bebas, penggunaan narkoba, alkohol, dan gawai yang semakin sulit dikendalikan.

Inovasi kurikulum dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi problematika dari kemajuan globalisasi. Dalam sambutannya di acara Hari Guru Nasional (HGN) 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mencetuskan konsep “Kurikulum Merdeka”. Konsep Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan unsur kebebasan dan keleluasaan untuk membuka diri, sebagai lembaga yang didedikasikan untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa era industri Revolusi 4.0 dan Masyarakat 5.0 (Suhartono, 2021).

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan berbagai kegiatan di kelas yang paling cocok untuk meningkatkan kreativitas dan pemikiran kritis siswa, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi konsep dan memperkuat kompetensi mereka (Widiastari & Yulian Dewi, 2022). Selama proses pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk memilih dari berbagai alat pengajaran, sehingga mereka dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat belajar siswanya. Implementasi kurikulum ini mencakup proyek-proyek informatif untuk meningkatkan kinerja profil Pancasila pada siswa. Perkembangan ini didasarkan pada tema-tema khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Muatan lokal adalah muatan materi pelajaran yang mengembangkan potensi lokal sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah dan sekolah. Selain itu, muatan lokal merupakan upaya melestarikan bahasa dan budaya daerah tempat sekolah tersebut berkembang. Bagi Sumatera Barat, mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) yang diterapkan sampai pada Kurikulum 2006 dan terhenti pada Kurikulum 2013, kemudian pada Kurikulum Merdeka akan diimplementasikan kembali menjadi Mata Pelajaran Keminangkabauan. Mata pelajaran ini pada dasarnya melibatkan pemahaman tentang lingkungan alam, sosial dan budaya Minangkabau (Siregar, 2020). Pembelajaran muatan lokal ini 'dihentikan', diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya dan sekarang dihidupkan kembali sebagai muatan lokal. Ini adalah salah satu konten pembelajaran yang harus dimiliki untuk meningkatkan budaya, khususnya budaya Minangkabau.

Mata pelajaran Keminangkabauan harus dipelajari kembali dalam kurikulum merdeka dengan penekanan pada nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya. Generasi muda akan dapat memahami dan menghargai warisan budayanya dengan mempelajari adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi masyarakat Minangkabau secara menyeluruh. Selain itu, mempelajari Keminangkabauan dapat membantu memahami lingkungan sendiri. Melalui sistem adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah (ASB-SBK), masyarakat Minangkabau memiliki hubungan yang harmonis dengan alam sekitarnya. Mempelajari hal ini dapat membantu memahami pentingnya menjaga kelestarian alam dan memanfaatkannya secara bijak. Kearifan lokal budaya sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Sayangnya, dalam kurikulum pendidikan formal di Sumatera Barat pada tahun 2013, mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau telah kehilangan pentingnya

kearifan lokal budayanya. Hal ini sangat penting karena kehilangan ini dapat menyebabkan identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau hilang.

Artikel ini menyoroti seraca spesifik tentang langkah-langkah yang bisa dilaksanakan oleh pemangku kepentingan untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran Keminangkabauan terlaksana secara optimal. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk melengkapi tulisan dari Afrilya dkk., (2020) tentang “Hilangnya Kearifan Lokal di Dalam Pendidikan Formal: Studi Kasus di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat” yang menyatakan bahwa beberapa faktor penyebab diberhentikannya Mata Pelajaran Budaya Alam Minangkabau di Sumatera Barat, diantaranya, 1) Pergantian kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013; 2) Tinjauan alokasi waktu pembelajaran; 3) Muatan Lokal BAM berganti menjadi Mata Pelajaran Prakarya.

Penelitian lain yang relevan dengan masalah tersebut adalah penelitian dari Roni dkk (2022) yang meneliti tentang penerapan hasil belajar BAM di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor internal dan eksternal memberikan pengaruh dalam penerapannya. Sehingga diperlukan upaya berupa program integrasi-interkoneksi PAI dalam rangka Penguatan Kebijakan Inovasi Merdeka Belajar yang perlu digagas Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan serta Kementerian Pendidikan Agama Pesisir Selatan dapat mencapai tujuannya. Didukung dengan hasil penelitian dari Ilham & Waston, (2022) bahwa proses internalisasi nilai-nilai Budaya Alam Minangkabau (BAM) terjadi melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler serta diperkuat dengan kewajiban mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) ke dalam kurikulum. Adapun penelitian Anastasha & Lasari (2023) memberikan solusi dengan adanya modul berbasis budaya lokal Minangkabau untuk meningkatkan ketahanan budaya siswa. Hasil yang efektif dapat dilihat pada pelaksanaan modul profil siswa Pancasila dengan mengembangkan kemampuan adaptasi budaya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pembelajaran Keminangkabauan dalam kurikulum merdeka harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ini akan membuat siswa lebih mudah memahami dan menginternalisasi nilai-nilai budaya yang diajarkan. Selain itu, komunitas lokal harus dilibatkan sebagai mitra dalam proses pembelajaran. Dengan memasukkan kembali mata pelajaran Keminangkabauan ke dalam kurikulum merdeka dapat mengembalikan kearifan lokal yang hilang. Hal ini akan membantu menjaga identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau serta meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda. Penelitian ini akan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, baik dari segi eksternal maupun internal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Sistematis Literatur Review* dengan menekankan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan membuat kesimpulan tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan subjek penelitian (Triandini et al., 2019). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yang tidak membutuhkan pengamatan langsung (Muhyani, 2019). Sumber utama penelitian ini adalah sepuluh literatur yang diperoleh dari platform elektronik yang terindeks sinta, seperti Portal Garuda, Google Scholar, dan *Direct of Open Access Journals* (DOAJ), yang telah melalui beberapa tahap penyaringan dan memenuhi kriteria. Penelitian sistematis tentang SLR harus melakukan hal-hal berikut:

Pertama, perencanaan (*planning*): Pada tahap ini, peneliti harus merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan dan menentukan tujuan penelitian. Kedua, peninjauan (*review*): Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dan berfokus pada proses pencarian literatur berbasis elektronik. Ketiga, peneliti memilih dan mengkategorikan literatur, melakukan *screening* dan menemukan literatur yang relevan, dan kemudian membuat kesimpulan tentang literatur secara keseluruhan.

Untuk menghasilkan hasil yang efektif dan efisien, proses pemeriksaan literatur sistematis meliputi 5 langkah yaitu: 1) *Research Question*; Peneliti akan merumuskan pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian. Pertanyaan penelitian ini akan mengacu pada latar belakang masalah yang akan diteliti.

“Bagaimana mengoptimalkan mata pelajaran Muatan Lokal Keminangkabauan pada Kurikulum Merdeka di Sumatera Barat?” 2) *Proses Pencarian (Search Process)*; Tahap ini, proses pencarian dan penelusuran literatur dari berbagai sumber elektronik yang terindeks sinta, seperti Portal Garuda, *Direct of Open Access Journals* (DOAJ), dan Google Scholar. Peneliti melihat bahwa ketiga data dasar tersebut dapat digunakan sebagai sumber yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian, 3) *Inclusion and Exclusion Criteria*; Pada tahap ini peneliti menetapkan beberapa kriteria untuk literatur yang akan digunakan sebagai sumber acuan dan dinilai relevan dengan topik penelitian. Kriteria-kriteria ini meliputi: Literatur dalam bentuk full-text jurnal atau konferensi; Batas waktu publikasi minimal lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023; Literatur yang membahas bagaimana mengoptimalkan mata pelajaran pengembangan lokal dalam kurikulum merdeka; dan Literatur yang ditulis menggunakan Bahasa Indonesia. 4) *Kualitas Penilaian (Quality Assesment)*; Pada tahap ini, literatur yang telah diidentifikasi sebagai sumber acuan dan dinilai relevan dengan topik penelitian akan diidentifikasi dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat untuk mengevaluasi kelayakan literatur yang telah dipilih: QA1; “Apakah literatur yang digunakan berasal dari jurnal dan konferensi yang disajikan secara keseluruhan? QA2; Apakah literatur yang digunakan untuk mendapatkan data diterbitkan selama lima tahun terakhir (2019–2023)? QA3; Apakah Literatur yang membahas mengoptimalkan mata pelajaran pengembangan lokal dalam kurikulum merdeka? QA4; Apakah literatur yang ditulis menggunakan Bahasa Indonesia? dan 5) *Proses Analisis Data*; Tahapan ini mencakup proses analisis dan penjabaran hasil penelitian dari berbagai literatur. Kesimpulan dari penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Hasil finalisasi data akhir terkait artikel yang relevan dari penelitian ini adalah 10 artikel yang bersumber dari jurnal terakreditasi sinta dari Portal Garuda, *Direct of Open Access Journals* (DOAJ), dan Google Scholar.

Tabel 1.

No	Penulis	Judul	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Afrilya dkk	Hilangnya Kearifan Lokal di Dalam Pendidikan Formal: Studi Kasus di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat	✓	2020	✓	✓
2	Efrianto & Afnita	<i>The Politeness of Bungo Pasang Language Using Kato Nan Ampek in Minangkabau</i>	✓	2019	✓	✓
3	Ilham & Waston	Internalisasi Nilai Adat Minang Pada Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau Sumatera Barat	✓	2022	✓	✓
4	Illahi dkk	<i>The existence of minangkabau culture subject in the curriculum of 2013</i>	✓	2022	✓	✓
5	Widiastari dkk	Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Peserta Didik Kelas 7 dalam Mata Pelajaran Bahasa Bali di SMP Dharma Wiweka Denpasar	✓	2022	✓	✓
6	Siregar	Pendidikan Berbasis Budaya Jawa Dalam Masyarakat Yogyakarta	✓	2020	✓	✓
7	Latifah	Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa Dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 Di SDN Sambiroto 01 Semarang	✓	2019	✓	✓
8	Anastasha & Lasari	Efektifitas Penggunaan Modul Berbasis Budaya Lokal Minangkabau Untuk Meningkatkan Ketahanan	✓	2023	✓	✓

		Budaya Siswa Kelas IV SD			
9	Pasaleron dkk	Problema Integrasi-Interkoneksi Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Penguatan Kebijakan Inovasi Merdeka Belajar di Pesisir Selatan	✓	2022	✓ ✓
10	Faradilaa & Andi	Integrasi Nilai-Nilai Batagak Penghulu pada Pembelajaran Sejarah di Sekolah	✓	2023	✓ ✓

Setelah didapatkan data relevan, maka pada tahap akhir akan menjawab pertanyaan dari *Research Question* (RQ) melalui proses analisis data dan penjabaran hasil penelitian.

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

Merujuk pada Pasal 87 (3) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan: Sesuai dengan struktur dan alokasi waktu dalam kurikulum nasional satuan pendidikan, kurikulum muatan pendidikan daerah meliputi mata pelajaran sebagai berikut: Budaya Alam Minangkabau dan Pendidikan Al-Quran untuk SD, SMP dan SMA/ sederajat (Gubernur Sumatera Barat, 2019). Tatanan lokal yang sudah ada sekitar tiga tahun harus direformasi. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan Permendiknas dengan Kurikulum Merdeka yang nantinya diimplementasikan dalam kurikulum Muatan Lokal. Oleh karena itu, perlu dijelaskan perkembangan mata pelajaran di tingkat daerah dalam peraturan daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat kemudian menindaklanjuti dengan menyusun pedoman untuk mengintegrasikan Keminangkabauan ke dalam semua mata pelajaran di sekolah umum di bawah pengawasannya (Ilham & Waston, 2022). Mesubstitusikan Materi Keminangkabauan ke dalam kurikulum juga sejalan dengan Misi Provinsi Sumatera Barat, yaitu “Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Barat, 2021).

Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi & Sumatera Barat (2016) juga menjelaskan bahwa tugas pokok Bidang Pendidikan Dasar adalah Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kurikulum dan kesiswaan. Tugas pokok ini dapat mengakomodasi untuk penyusunan kebijakan dan kurikulum pendidikan daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan tujuan memperkuat karakteristik daerah dan memelihara potensi daerah Minangkabau.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk memasukkan mata pelajaran Keminangkabauan ke dalam Kurikulum Merdeka. Upaya ini dilakukan sebagai bukti betapa pentingnya mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai lokal di tengah arus globalisasi yang semakin cepat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat silabus dan modul pembelajaran yang khusus mengajarkan tentang Keminangkabauan. Silabus ini memberi siswa kesempatan untuk mempelajari secara mendalam tentang sejarah, adat istiadat, seni, dan kearifan lokal Minangkabau, serta membuat kerajinan tangan, memasak, dan mengenal alam sekitar. Selain itu, sebagai cara untuk memperkenalkan Keminangkabauan kepada masyarakat umum, pemerintah provinsi aktif mengadakan festival budaya dan pertunjukan seni. Festival-festival ini menarik wisatawan dari luar daerah dan mancanegara. Upaya ini diharapkan dapat membantu generasi muda Sumatera Barat mengenal dan menghargai warisan budaya mereka sendiri. Selain itu, diharapkan bahwa penggabungan mata pelajaran Keminangkabauan akan membantu meningkatkan rasa kebanggaan dan identitas lokal di era globalisasi yang semakin kuat.

Tim Pengembangan Kurikulum Daerah

Tim Pengembang Kurikulum Daerah (TPKD) adalah kelompok kerja tidak terstruktur yang bertugas membantu dewan sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Provinsi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sedangkan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

TPKD dibentuk dalam suatu daerah untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Keminangkabauan adalah salah satu mata pelajaran TPKD yang dikembangkan untuk Kurikulum Merdeka. Untuk memulai proses pembentukan TPKD yang terdiri dari para ahli pendidikan, guru, tokoh masyarakat, dan perwakilan siswa dipilih. Setelah itu, tim akan melakukan analisis menyeluruh tentang kondisi Keminangkabauan di wilayah tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat dimasukkan ke dalam subjek Keminangkabauan. Setelah analisis selesai, Tim akan membuat kurikulum Keminangkabauan. Kurikulum ini akan mencakup materi pembelajaran, pendekatan pengajaran, dan penilaian hasil belajar sehingga siswa dapat memahami dan menghargai budaya Minangkabau dan mempertahankannya. Selain itu, TPKD akan melibatkan semua orang yang terlibat dalam proses penerapan kurikulum. Guru akan dilatih khusus untuk mengajar mata pelajaran ini dengan baik. Selain itu, kerjasama dengan komunitas lokal dilakukan untuk memberi siswa kesempatan untuk mempelajari nilai-nilai Keminangkabauan dan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan mereka.

Tim pengembang kurikulum memiliki peran sebagai fasilitator dan inovator (Panjaitan, 2011). Untuk mendukung tugas Dinas Pendidikan, Tim mempunyai tugas sebagai berikut: a) memberikan layanan dan saran tentang kurikulum dan pembelajaran bagi mereka yang membutuhkan; b) mensosialisasikan politik kurikulum; c) penguatan satuan pendidikan; Melaksanakan sosialisasi kabupaten/kota menengah atas Permendiknas No. 22/2006 dan Permendiknas No. 23; dan d) Pelatihan dan pembinaan berkelanjutan dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan dasar dan menengah kabupaten/kota.

Pada Kurikulum Merdeka, pengembangan kurikulum dengan muatan lokal tidak lagi dilakukan oleh guru, tetapi oleh tim pengembangan kurikulum daerah di Sumatera Barat di tingkat provinsi. Kurikulum ini dikembangkan dalam kaitannya dengan standar isi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Namun, sekolah dengan kompetensi khusus juga dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari dewan pendidikan kabupaten atau kota.

Tim Pengembangan Kurikulum Daerah sangat penting untuk mengembangkan mata pelajaran budaya Minangkabau. Tim ini terdiri dari para ahli dan praktisi pendidikan yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya Minangkabau serta pengalaman dalam merancang kurikulum. Mereka dapat mengumpulkan informasi dan materi pembelajaran asli dengan bekerja sama dengan seniman, tokoh masyarakat, dan budayawan lokal. Selain itu, tim pengembangan kurikulum daerah memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil mengintegrasikan budaya lokal ke dalam kurikulum mereka. Hal ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang metode pembelajaran yang efektif serta konten apa pun yang relevan untuk dimasukkan ke dalam mata pelajaran budaya Minangkabau. Selain itu, tim ini juga bertanggung jawab untuk membuat pedoman dan bahan ajar untuk guru agar mereka dapat mengajar mata pelajaran tersebut dengan baik. Pedoman tersebut harus mudah dipahami oleh guru agar mereka dapat menerapkannya dengan baik selama proses pembelajaran.

Anggota tim pengembang memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan dalam mengembangkan kurikulum lokal. Mereka yang terlibat dalam tim pengembang harus bertanggung jawab untuk merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi konten materi, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa kurikulum ini memasukkan elemen Keminangkabauan, seperti tradisi, seni tradisional, dan pemahaman tentang flora dan fauna lokal. Selain itu, tanggung jawab anggota tim

pengembang adalah menemukan sumber pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran. Mereka harus mencari buku teks, artikel ilmiah, video dokumenter, dan sumber lain yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

Selain itu, anggota tim pengembang harus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan kurikulum ini. Mereka dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi dan materi pembelajaran yang autentik dengan memahami budaya lokal dan pengalaman merancang kurikulum. Selain itu, tim ini juga bertanggung jawab untuk membuat panduan dan bahan ajar untuk guru agar mereka dapat mengajar mata pelajaran tersebut dengan baik. Dengan demikian, pendidikan yang baik dapat membantu melestarikan kearifan lokal.

Sekolah dan Komite

Di Sumatera Barat, sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan mata pelajaran Keminangkabauan dalam kurikulum merdeka. Pertama dan terpenting, sekolah harus menjadi tempat di mana orang dapat mempelajari dan menerapkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang asli. Guru dapat mengajarkan siswa tentang kearifan lokal, sejarah, dan adat istiadat daerah. Sekolah dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengadakan acara budaya, seperti tarian dan penampilan musik tradisional Minangkabau. Hal ini akan memberi siswa kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang budaya mereka sendiri dan meningkatkan rasa cinta mereka terhadap warisan budaya mereka. Selain itu, komite sekolah sangat penting untuk mengembangkan mata pelajaran Keminangkabauan. Komite ini dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk menyediakan sumber daya seperti buku teks, media interaktif, dan laboratorium alam.

Untuk memastikan bahwa pengembangan mata pelajaran Keminangkabauan berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan siswa, komite sekolah sangat penting. Komite juga dapat melibatkan orang tua siswa untuk membantu dan mengawasi perkembangan anak-anak mereka. Secara keseluruhan, peran sekolah dan komite sangat penting dalam pengembangan mata pelajaran Keminangkabauan di Sumatera Barat. Dengan kerja sama yang baik antara sekolah, komite, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat, diharapkan pengajaran Keminangkabauan dapat berjalan dengan baik dan siswa dapat mengembangkan rasa cinta dan kepedulian terhadap Keminangkabauan.

Sekolah dan komite mempunyai wewenang sepenuhnya dalam mengembangkan mata pelajaran Keminangkabauan untuk tiap tingkat satuan pendidikan. Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan penanganan yang serius dan profesional dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kurikulum muatan lokal ini. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung merupakan bentuk salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dan komite sekolah guna menyukseskan implementasi mata pelajaran Keminangkabauan pada kurikulum Merdeka.

Guru Keminangkabauan

Guru memiliki peran yang sangat sentral sebagai perencana, pelaksana dan evaluator dalam pengembangan kurikulum muatan lokal. Guru diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan bahan ajar, termasuk muatan lokal, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah tempat mereka bekerja (Basari, 2014). Sekolah dan dewan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk mengembangkan mata pelajaran Keminangkabauan untuk setiap jenjang satuan pendidikan. Memahami hal ini membutuhkan pendekatan yang serius dan profesional terhadap desain, pengelolaan dan implementasi kurikulum muatan lokal ini. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan bentuk tindakan yang dapat dilakukan sekolah dan dewan sekolah untuk berhasil mengimplementasikan mata pelajaran Keminangkabauan dalam Kurikulum Merdeka. Sebagai guru kearifan lokal di Sumatera Barat, guru tidak hanya harus memiliki kompetensi pedagogik, sosial,

personal dan profesional, tetapi juga kompetensi khusus yang disebut keterampilan budaya. Kompetensi budaya adalah kompetensi pemahaman yang intensif terhadap kelompok tertentu. Hal ini menuntut guru Keminangkabauan untuk memahami gagasan, perilaku dan manifestasi fisik Keminangkabauan.

Guru Keminangkabauan sangat memahami budaya, bahasa, seni, dan prinsip hidup masyarakat Minangkabau. Tugas guru budaya adalah mengajarkan siswa tentang sejarah dan perkembangan kebudayaan Minangkabau. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengajarkan siswa bagaimana menjaga dan melestarikan tradisi lokal serta menghargai seni dan keindahan karya seni Minangkabau. Selain itu, guru Keminangkabauan berfungsi sebagai dokumentator kehidupan masyarakat Minangkabau. Mereka memberikan siswa informasi tentang cerita rakyat, legenda, dan tokoh-tokoh terkenal dari suku Minangkabau.

Untuk mendapatkan hasil yang baik, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Keminangkabauan dan mampu menyampaikan informasi tersebut secara menarik dan interaktif. Selain itu, guru harus memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman di mana siswa dapat berbicara dan mengajukan pertanyaan tentang Keminangkabauan. Misalnya, untuk memberi tahu siswa tentang keindahan alam Minangkabau, guru dapat menggunakan media audiovisual seperti video dokumenter atau presentasi multimedia. Sebagai bagian dari pembelajaran Keminangkabauan, guru juga dapat mengadakan kunjungan lapangan ke tempat bersejarah atau objek wisata di Sumatera Barat. Kunjungan lapangan ini akan memberikan pengalaman langsung kepada siswa dan membuat mereka lebih menghargai dan mencintai Keminangkabauan. Selain itu, guru juga dapat mengundang tokoh-tokoh budaya atau ahli dalam bidang tersebut untuk memberikan kuliah tamu atau workshop kepada siswa.

MGMP/ KKG Keminangkabauan

Musyawarah Guru Mata Pelajaran/ Kelompok Kerja Guru (MGMP/KKG) merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi guru. MGMP/KKG Mata Pelajaran Keminangkabauan sebagai organisasi profesi guru mata pelajaran Keminangkabauan yang bertujuan sebagai wahana komunikasi, pembelajaran dan pertukaran ide dan pengalaman untuk meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pembuat perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Hubungan antara partisipasi yang aktif dan komunikatif dimaksudkan untuk mendukung asumsi awal bahwa respon positif guru terhadap pelaksanaan program MGMP berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan dan kecakapan keterampilan guru (Saragih & Dewi, 2018). Namun dalam implementasi kurikulum, fenomena yang sering muncul adalah mata pelajaran ini diajarkan oleh beberapa guru yang bukan termasuk guru yang mempelajari Keminangkabauan. Guru Keminangkabauan saat ini berasal dari berbagai disiplin ilmu.

Pelaksanaan MGMP secara teratur, berkesinambungan dan tepat sasaran dapat meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan profesionalisme guru, khususnya guru mata pelajaran Keminangkabauan. Namun demikian, diperlukan sumber dana untuk keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak, terutama pemerintah daerah, masih sangat dibutuhkan. Untuk itu, instansi pemerintah terkait pendidikan seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan lain-lain akan lebih meningkatkan koordinasi untuk memfasilitasi kegiatan yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan kinerja guru (Najri, 2020). Keputusan kebijakan yang tepat memudahkan pelaksanaan kegiatan MGMP. Upaya pengembangan dan pemantauan keutuhan fasilitas dan pendanaan kegiatan MGMP serta pelaksanaan kegiatan MGMP perlu dilakukan secara berkala melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi kemajuan dunia pendidikan.

Dalam pengembangan kurikulum, MGMP/KKG Keminangkabauan memberikan wadah bagi guru-guru yang mengajar mata pelajaran tersebut untuk bekerja sama, berbagi pengalaman, dan saling memperkuat. Anggota MGMP/KKG dapat membuat rencana pembelajaran yang lebih baik dan efektif melalui pertemuan dan diskusi teratur. Selain itu, MGMP/KKG berfungsi untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar

Keminangkabauan. Guru dapat mendapatkan informasi terbaru tentang materi pembelajaran dan saling belajar dari pengalaman siswa dalam pertemuan rutin ini. Selain itu, MGMP/KKG berfungsi sebagai pusat untuk menyebarkan informasi tentang program pendidikan budaya alam kepada masyarakat umum. Melalui kegiatan seperti seminar atau workshop, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang Keminangkabauan dan pentingnya melestarikannya.

Perguruan Tinggi Sumatera Barat

Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) bertanggung jawab untuk menghasilkan guru-guru yang berkualitas untuk mengajar Keminangkabauan. Guru-guru ini harus memahami sejarah, adat istiadat, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau, dan mampu memasukkan nilai-nilai budaya ini ke dalam pembelajaran sehari-hari.

LPTK dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan topik ini. Pertama, mereka harus membuat kurikulum yang memasukkan aspek-aspek penting dari Keminangkabauan. Kurikulum harus dirancang sehingga siswa dapat mempelajari tradisi, seni, musik, dan tarian serta kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Selain itu, LPTK juga dapat bekerja sama dengan lembaga budaya lokal untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan Keminangkabauan. Misalnya, mereka dapat mengadakan festival seni tradisional atau pameran lukisan dengan tema budaya lokal. Akibatnya, LPTK di Sumatera Barat memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan mata pelajaran Keminangkabauan di Kurikulum Merdeka. Melalui upaya ini, generasi muda akan dapat memahami dan menghargai warisan budaya mereka sendiri dan menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam melestarikan dan mengembangkan Keminangkabauan.

Guru sekolah perlu diangkat kembali untuk melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau. Upaya ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah jabatan guru. Pra-pelatihan dapat dikembangkan dengan mendirikan Program Studi Pendidikan Alam dan Budaya Minangkabau atau dengan menambahkan Kredit Semester (SKS) pada jurusan tertentu di perguruan tinggi dan universitas. Upaya seperti ini turut melestarikan kearifan Sumatera Barat di universitas.

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai salah satu Lembaga Keguruan dan Ilmu Pendidikan (LPTK) Sumatera Barat memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan mata pelajaran Keminangkabauan. UNP sebagai lembaga pengelola program pelatihan calon guru diharapkan dapat “menghasilkan” calon guru profesional di bidang Keminangkabauan (Agustina, 2012). Salah satu peluang yang bisa diberikan UNP adalah mengaktifkan kembali program studi Keminangkabauan yang dibuka di Fakultas Bahasa dan Seni yang lulusannya profesional di bidang Keminangkabauan. Berdiri sejak 1985, dengan kurikulum sastra Minangkabau, Universitas Andalas memiliki visi: “Menjadi program studi yang terkemuka dan bermartabat di tingkat Internasional dalam bidang budaya berbasis bahasa dan sastra Minangkabau pada 2028” (Sastra Minangkabau, 2020). Program Studi Sastra Minangkabau memberikan bimbingan dan bantuan teknis dalam mengidentifikasi dan menggambarkan kondisi lingkungan, peluang dan kebutuhan komposisi Keminangkabauan, serta berkontribusi pada cakupan materi untuk setiap pelajaran Keminangkabauan.

Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Barat

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumatera Barat juga berperan dalam implementasi kurikulum muatan lokal. BBPMP adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah Sumatera Barat dalam bentuk pemeriksaan, pembinaan, pengelolaan dan bantuan teknis kepada lembaga pendidikan untuk menjamin mutu lembaga pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. BBPMP memiliki tugas

yaitu mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dini hingga menengah di provinsi Sumatera Barat (*Tentang BBPMP Sumatera Barat*, n.d.).

Untuk mencapai kemajuan pendidikan di Sumatera Barat, Badan Pengembangan Mutu Pendidikan (BBPMP) bertanggung jawab untuk menjamin pendidikan berkualitas. BBPMP juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan meningkatkan mutu pendidikan agar sesuai dengan standar nasional. Salah satu tujuan utama BBPMP adalah memastikan bahwa semua lembaga pendidikan di Sumatera Barat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Untuk mencapai tujuan ini, BBPMP bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kurikulum, metode pengajaran, dan fasilitas fisik sekolah. Mereka juga harus memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi yang memadai dan terus menerima pelatihan profesional.

Dengan keterlibatan BBPMP sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum merdeka di Sumatera Barat, budaya lokal Keminangkabauan dapat diintegrasikan secara menyeluruh. Hal ini akan memberi siswa kesempatan untuk belajar tentang budaya lokal melalui mata pelajaran seperti sejarah, seni tradisional, bahasa lokal, dan sebagainya. Selain itu, jika siswa belajar tentang budaya lokal, mereka akan lebih percaya diri dan menghargai lingkungan mereka karena mereka lebih memahami nilai-nilai Keminangkabauan.

Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pembelajaran di sekolah. Siswa harus memiliki pemahaman yang baik tentang pelajaran, proses pembelajaran berjalan dengan baik, dan penilaian prestasi siswa yang objektif harus dilakukan oleh BBPMP. Selain itu, tanggung jawab BBPMP adalah untuk memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang kebijakan pendidikan yang perlu diperbaiki atau dibuat. Selain itu, mereka harus berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, BBPMP harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kerja sama yang efektif ini akan memastikan bahwa pendidikan di Sumatera Barat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat terbaik bagi siswa. Secara keseluruhan, tujuan dan tanggung jawab BBPMP adalah untuk memastikan bahwa pendidikan di Sumatera Barat berkualitas tinggi. Dengan melakukan evaluasi, pengawasan, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, BBPMP dapat memastikan bahwa pendidikan di daerah tersebut sesuai dengan standar nasional dan memberi manfaat yang maksimal bagi siswa.

Beberapa bidang yang dapat dilakukan BPPMP Sumatera Barat untuk memaksimalkan pelaksanaan mata pelajaran Keminangkabauan antara lain pelatihan dan pendidikan guru Keminangkabauan untuk mempertahankan dan meningkatkan keterampilannya.

Untuk membuat materi pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Barat dapat bekerja sama dengan pendidik dan ahli budaya. Salah satu contoh nyata dari peran mereka adalah pengenalan adat istiadat Minangkabau melalui mata pelajaran seni budaya. Siswa diajarkan tentang tarian tradisional, musik tradisional, dan pakaian adat Minangkabau. Mereka juga belajar tentang filosofi yang mendasari adat istiadat, seperti gotong royong dan sikap saling menghormati. Selain itu, sekolah-sekolah menerima bantuan dari Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Barat untuk kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan Keminangkabauan. Mereka memberikan dana dan dukungan teknis untuk menyelenggarakan festival budaya, pertunjukan seni, dan kegiatan lainnya yang membantu siswa memahami kekayaan budaya mereka.

Lembaga Kerapatan Adat alam Minangkabau

Partisipasi masyarakat juga diperlukan sehubungan dengan desentralisasi dan demokratisasi pendidikan. Masyarakat dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan diklat kurikulum Merdeka. Para tokoh adat, seperti anggota Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau (LKAAM) sebagai lembaga yang memberikan sarana untuk pelestarian budaya dan adat (Afrinaldi, 2009), sehingga dapat memberikan bimbingan mendalam kepada para

guru Keminangkabauan. Dalam mengembangkan kurikulum Keminangkabauan di Sumatera Barat, LKAAM memainkan peran yang sangat penting. LKAAM dapat memberikan informasi tentang melestarikan nilai-nilai luhur adat Minangkabau dan mengembangkan falsafah tradisional Minangkabau yaitu Basandi Syarak Adat, Syarak Basandi Kitabullah.

LKAAM adalah lembaga adat yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal dan budaya alam suatu wilayah. Dalam konteks ini, LKAAM berfungsi sebagai penjaga dan pengawal keberlanjutan Keminangkabauan. LKAAM bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat Keminangkabauan menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Tujuannya adalah untuk memberi generasi muda pemahaman, penghargaan, dan pelestarian warisan budaya yang ada. Materi ini termasuk prinsip-prinsip adat, tradisi, seni, bahasa, dan pemahaman tentang lingkungan sekitar mereka.

LKAAM juga melibatkan tokoh adat dan ahli kebudayaan setempat dalam pembuatan kurikulum Keminangkabauan. LKAAM juga memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah tentang apa yang harus diajarkan kepada peserta didik. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan Keminangkabauan, mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan festival budaya. Dengan peran LKAAM dalam mengembangkan kurikulum Keminangkabauan, diharapkan generasi muda dapat menjadi pemimpin perubahan yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Kurikulum Merdeka di Sumatera Barat membantu siswa mempelajari nilai-nilai budaya Minangkabau secara alami.

Temuan dari penelitian ini menjadi solusi dari penelitian Afrilya dkk., (2020) tentang “Hilangnya Kearifan Lokal di Dalam Pendidikan Formal: Studi Kasus di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat”. Selain itu, penelitian ini juga menjawab beberapa tantangan dan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti lain seperti penelitian Roni dkk (2022) dan penelitian Ilham & Waston (2022) tentang problematika implementasi nilai-nilai Minangkabau pada Mata Pelajaran Muatan Lokal Keminangkabauan di Kurikulum Merdeka. Namun, dalam realisasi terhadap solusi yang diberikan masih perlu adanya pengembangan dari aspek lain. Seperti penelitian Anastasha & Lasari, (2023) memberikan solusi berupa pengembangan modul pembelajaran.

SIMPULAN

Muatan Lokal merupakan salah satu mata pelajaran yang mendukung pencapaian Tujuan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Hal ini diatur dalam Pasal 37 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yang mengatur bahwa muatan lokal adalah kegiatan kurikuler yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemungkinan daerah masing-masing. Kurikulum ini dikembangkan dalam kaitannya dengan standar isi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Memahami hal ini membutuhkan pendekatan yang serius dan profesional terhadap desain, pengelolaan dan implementasi kurikulum muatan lokal ini. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan bentuk tindakan yang dapat dilakukan sekolah dan komite sekolah untuk berhasil mengimplementasikan mata pelajaran Keminangkabauan dalam kurikulum Merdeka. Guru Keminangkabauan yang berpartisipasi aktif dalam MGMP/KKG dapat memperluas pandangan dan pengetahuannya dalam berbagai hal, terutama dalam mengelola isi bahan ajar, membuat bahan ajar, memaksimalkan penggunaan strategi pengajaran, metode pengajaran, kesempatan belajar/prasarana, penggunaan. Selain itu, juga perlu bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan dan LKAAM sebagai Lembaga yang memberikan sarana untuk melestarikan budaya dan Adat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

Afrilya, V. R., Siregar, J. S., & Jubaedah, L. (2020). Hilangnya Kearifan Lokal Di Dalam Pendidikan Formal: Studi Kasus Di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. *Program Studi Pendidikan Antropologi*,

- 3491 *Optimalisasi Mata Pelajaran Muatan Lokal pada Kurikulum Merdeka (Studi pada Mata Pelajaran Keminangkabauan, Sumatera Barat) - Rilci Kurnia Illahi, Rahmi Yunita, Khadijah, Andika Dirsa, Ade Sri Wahyuni*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7367>
- Universitas Negeri Medan, 1, 148–153. <https://senaspa.unimed.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/17-Vinta-148-153.pdf>
- Afrinaldi, A. (2009). Rekonstruksi Pendidikan Surau Di Minangkabau (Tinjauan Analisis Psikologi Sosial). *Ta'dib*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.31958/Jt.V12i2.169>
- Agustina, A. (2012). Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau (Bam) Sebagai Wadah Pelestarian Kearifan Lokal: Antara Harapan Dan Kenyataan. *Jurnal Bahasa Dan Seni*, 13(1), 23–32. <http://repository.unp.ac.id/id/eprint/16419>
- Anastasha, D. A., & Lasari, Y. L. (2023). Efektifitas Penggunaan Modul Berbasis Budaya Lokal Minangkabau Untuk Meningkatkan Ketahanan Budaya Siswa Kelas Iv Sd. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 6(2), 137–147. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4914>
- Basari, A. (2014). Penguatan Kurikulum Muatan Lokal Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(1), Article 1. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pip/article/view/6895>
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi & Sumatera Barat. (2016). *Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026—Dinas Pendidikan Sumatera Barat*. <https://disdik.sumbarprov.go.id/halaman-utama/rencana-strategis-renstra-tahun-2021-2026.html>
- Gubernur Sumatera Barat. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Ilham & Waston. (2022). *Internalisasi Nilai Adat Minang Pada Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau Sumatera Barat [S3, Universitas Muhammadiyah Surakarta]*. <http://eprints.ums.ac.id/100913/>
- Kautsar, H. S. (2022). *Citayam Fashion Week Diduga Jadi Sarang Lgbt, Begini Tanggapan Mui - Pikiran-Rakyat.Com*. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015114321/citayam-fashion-week-diduga-jadi-sarang-lgbt-begini-tanggapan-mui>
- Muhyani. (2019). *Metodologi Penelitian Cara Mudah Melakukan Penelitian*. Uika Press.
- Najri, P. (2020). Mgmp Dalam Meningkatkan Keprofesionalan Guru Mata Pelajaran. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), Article 1. <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/aktualita/article/view/166>
- Panjaitan, M. O. (2011). Kemampuan Tim Pengembang Kurikulum Merancang Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Yang Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kompleks (Suatu Survei Terhadap Tpk Di 4 Kabupaten). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(5), 491–500. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i5.44>
- Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Barat. (2021). *Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*. <https://ppid.sumbarprov.go.id/home/pages/39-Visi-Dan-Misi-Pemerintah-Provinsi-Sumatera-Barat.html>
- Roni, R. P., Nurdin, S., & Kosim, M. (2022). Problema Integrasi-Interkoneksi Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Penguatan Kebijakan Inovasi Merdeka Belajar Di Pesisir Selatan. *Iq (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 5(02), 153–170. <https://doi.org/10.37542/iq.v5i02.679>
- Saragih, M., & Dewi, R. S. (2018). Efektifitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Bahasa Inggris Di Kota Binjai. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Sastra Minangkabau. (2020). *Visi Dan Misi Program Studi Sastra Minangkabau*. <http://sastraminang.fib.unand.ac.id/index.php/profil/143-Visi-Dan-Misi-Program-Studi-Sastra-Minangkabau>
- Setyawati, Y., Septiani, Q., Aulia Ningrum, R., & Hidayah, R. (2021). Imbas Negatif Globalisasi Terhadap Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 306–315.

- 3492 *Optimalisasi Mata Pelajaran Muatan Lokal pada Kurikulum Merdeka (Studi pada Mata Pelajaran Keminangkabauan, Sumatera Barat) - Rilci Kurnia Illahi, Rahmi Yunita, Khadijah, Andika Dirsa, Ade Sri Wahyuni*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7367>
- https://Scholar.Google.Com/Scholar?hl=en&as_sdt=0%2c5&q=+Imbas+Negatif+Globalisasi+Terhadap+Pendidikan+Di+Indonesia.+Jurnal+Kewarganegaraan&btnq=
- Siregar, J. S. (2020). Pendidikan Berbasis Budaya Jawa Dalam Masyarakat Yogyakarta. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1–10. https://Scholar.Google.Com/Scholar?hl=en&as_sdt=0%2c5&q=Pendidikan+Berbasis+Budaya+Jawa+Dalam+Masyarakat+Yogyakarta&btnq=
- Suhartono, O. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/Rosikhun.V1i1.13897>
- Tentang Bbpm Sumatera Barat. (N.D.). Retrieved November 7, 2022, From <https://lpmpsumbar.kemdikbud.go.id/about/>
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Information Systems*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24002/Ijis.V1i2.1916>
- Widiastari, N. L. P. D., & Yulianewi, N. W. (2022). Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Peserta Didik Kelas 7 Dalam Mata Pelajaran Bahasa Bali Di Smp Dharma Wiweka Denpasar. *Dharma Sastra: Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Daerah*, 2(2), 166–170. <https://doi.org/10.25078/Ds.V2i2.987>